

The Role of Technology in Achieving Good Governance: A Public Administration Theory Perspective

Viny Elvia¹, M. Fachri Adnan², Afriva Khaidir³

Universitas Negeri Padang^{1,2,3}

*E-mail: viny@fis.unp.ac.id

Abstrak

This research aims to explore the role of technology in creating good governance in the public sector, especially in the digital era which is characterized by the rapid adoption of information and communication technology. The method used in this research is a literature review, which involves analyzing literature related to public administration theory and innovation in public sector organizations. This research identifies various challenges faced, such as gaps in access to technology, public understanding of the use of technology, and bureaucratic readiness to adapt to change. The main issue raised is how technology can be effectively integrated into good governance practices to improve the quality of public services. The research results show that innovation through information technology, such as e-government and big data, has an important role in increasing transparency, accountability and responsiveness of public services. Despite progress in the application of technology, challenges remain, including the need to increase public understanding and skills and the readiness of the bureaucracy to adopt change. The conclusion of this research confirms that to achieve effective good governance, the government needs to encourage innovation in public services by utilizing the latest technology. With these steps, it is hoped that the quality of public services can improve, and the public can be more involved in the decision-making process, thereby creating a more transparent and accountable government.

Keywords: Technology, good governance, innovation



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi pendorong utama dalam transformasi berbagai sektor, termasuk sektor publik. Digitalisasi sektor publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Good governance didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup pengelolaan sumber daya publik yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Good governance dapat didefinisikan sebagai manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (Putu Tirka Widanti, 2024). Pelayanan publik yang baik adalah tanggung jawab pemerintah selain menyelenggarakan pemerintahan (Rohman & Hanafi, 2019). United Nation Development Programme (UNDP) dalam (Sulfiani, 2021) mengemukakan karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan good governance, meliputi Partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan Efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.

Dalam laporan mengenai "Governance and Development" tahun 1992, world bank menggambarkan good governance sebagai penyediaan layanan publik yang efisien, sistem

pengadilan yang dapat diandalkan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab pada publik (Retnowati & Retnowati, 2008). Dalam tulisannya (Sagena et al., 2023) menekankan betapa pentingnya partisipasi publik dan tata kelola yang baik dalam pelayanan publik, serta betapa pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tulisannya (Widyasari et al., 2024) menyatakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan dan cita-cita bangsa, setiap pemerintahan harus menjalankan pemerintahan yang baik (good governance).

Dewasa ini, upaya adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan sudah semakin masif dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh dunia, begitupun di Indonesia. Teknologi informasi adalah jenis teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Ini termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan individu, perusahaan, dan pemerintahan, serta sebagai informasi strategis untuk pengambilan keputusan (Cecep Abdul Cholik, 2021). Dalam tulisannya (Widodo, 2016) pemerintah Indonesia mulai menggunakan e-government untuk menyebarkan informasi. Pemerintah dapat menggunakan e-mail untuk berinteraksi dengan masyarakat, sebagian besar untuk layanan pengaduan. Contoh lain adalah implementasi SIPKD, atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tata kelola pemerintahan tentunya tidak bisa dilepaskan dengan teori administrasi publik, sebagaimana konsep dan prinsip-prinsip dari good governance merupakan bagian dari teori administrasi publik itu sendiri. Dalam buku *The Public Administration Dictionary* yang penulis kutip dalam tulisan (Yusri, 2020), Chandler & Plano mengatakan bahwa administrasi adalah proses penerapan kebijakan. Fokus administrasi negara adalah Penegakan hukum, yaitu proses pembuatan peraturan dan regulasi yang digunakan untuk menjalankan kebijakan publik. Tujuan administrasi Negara adalah non-profit yang ditunjukkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Saat ini cukup banyak terobosan program pemerintah, mulai di tingkat pusat hingga pemerintahan desa, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sebut saja SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi), IKD (Identitas Kependudukan Digital), program Government Technology (GovTech), dan banyak lagi program-program berbasis teknologi yang diperkenalkan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Yang terbaru terdapat program *Lapor Mas Wapres* yang diperkenalkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, meskipun sudah cukup masif pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, tantangannya tetap ada. Yang paling menonjol adalah masih terdapatnya kesenjangan dalam akses teknologi, pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi, dan kesiapan birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam hal ini, teori administrasi publik memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam praktik pemerintahan yang baik.

Simon dalam (Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, 2023) menjelaskan dasar-dasar administrasi publik yaitu: 1) Efektivitas dari administrasi dilakukan melalui peningkatan spesialisasi tugas diantara sekelompok orang; 2) Efektivitas administrasi dilakukan melalui peningkatan lewat pengaturan bagian-bagian pihak pada sebuah hierarki pewenangan yang tepat; 3) Efektivitas administrasi dilakukan melalui peningkatan lewat pembatasan jarak-jarak dalam mengawasi masing-masing perusahaan pada instansi hingga menjadi semakin sedikit; 4) Efektivitas administrasi membedakan tugas-tugas dalam mengawasi, sesuai dengan tujuan, proses, langganan, dan tempat.

Administrasi publik mencakup berbagai pendekatan dan model, dapat membantu dalam menganalisis bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, teori partisipasi publik dapat menjelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam mewujudkan good governance melalui lensa teori administrasi publik. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan

dan peluang yang dihadapi dalam implementasi teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari data berdasarkan sudut pandang peneliti. Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis dan pemahaman terhadap buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, serta sumber dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Danandjaja dalam (Idhartono, 2020) menjelaskan Penelitian studi literatur merupakan cara meneliti yang menggunakan referensi atau rujukan terancang secara ilmiah yang meliputi mengumpulkan bahan referensi yang berhubungan dengan tujuan penelitian, Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan mengintegrasikan serta menyajikan data. Penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Teknologi dalam Mewujudkan Good Governance

Melalui teknologi informasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis (Sirait, 2016). Dalam tulisannya (Cecep Abdul Cholik, 2021) menjelaskan Komputerisasi pemerintahan atau e-government, serta sumber daya manusia dan pendidikan, harus dilakukan untuk mencapai target penerapan teknologi informasi. Hal ini karena penerapan teknologi informasi akan berhasil hanya jika pengguna benar-benar memahaminya sehingga sasarannya dapat dicapai.

Teknologi digital adalah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan yang dilakukan secara digital atau komputer dibandingkan dengan tenaga manusia. Teknologi digital biasanya berfokus pada sistem pengoprasian yang serba otomatis dan canggih dengan format dan komputeralisasi yang dapat dibaca oleh komputer (Danuri, 2019). Dampak yang nyata dari sistem informasi ini adalah pemerosesan data yang mengalami perubahan yang awalnya manual sedangkan adanya teknologi ini ada suatu alat yang bisa mempercepat atau mempersingkat waktu yaitu sistem komputer (Septiandito Saputra, 2021). Merespon perkembangan teknologi yang begitu masif, serta upaya mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, pemerintah sudah meluncurkan banyak program berbasis digital. Setiyono dalam (Bachtiar et al., 2020) menjelaskan adanya birokrasi digital diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan konsep good governance maka diperlukan peran dan kerjasama antar tiga aktor utama, yakni pemerintah, swasta, dan civil society. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya (Handayani & Nur, 2019). Pemerintahan yang baik menuntut agar pemerintah tidak hanya mewakili rakyatnya tetapi juga tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya. Rasa tanggap dan komitmen yang kuat untuk melayani rakyatnya – pelanggan dan klien pemerintah – akan menjamin penyediaan layanan yang efisien kepada rakyat (Srivastava, 2011). Dalam tulisannya (Kusuma, 2022) menjelaskan dalam upaya mewujudkan good governance, sumber daya manusia (SDM) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu selalu memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik, menyederhanakan berbagai kebijakan, serta dalam proses reformasi birokrasi.

Peran teknologi dalam mewujudkan good governance sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penerapan sistem informasi dan platform digital, pemerintah dapat mengotomatisasi proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya. Misalnya, penggunaan aplikasi untuk pengajuan izin atau pengelolaan pengaduan masyarakat memungkinkan layanan publik disampaikan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi pengumpulan dan analisis data yang dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

Selain efisiensi, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah. Melalui platform digital, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam forum diskusi. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan harapan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif. Selain itu, transparansi yang ditawarkan oleh teknologi, seperti akses terhadap informasi publik dan laporan kinerja, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan inti dari good governance.

Idealnya, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan untuk mewujudkan good governance harus berfokus pada integrasi sistem yang transparan, responsif, dan partisipatif. Pemerintah perlu mengembangkan platform digital yang memungkinkan akses mudah bagi masyarakat terhadap informasi dan layanan publik, seperti portal e-government yang menyediakan data real-time mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja layanan. Selain itu, teknologi harus digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, seperti aplikasi mobile untuk pengaduan dan umpan balik, sehingga suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi melalui teknologi, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

2. Peran Teknologi dalam Mewujudkan Good Governance: Perspektif Teori Administrasi Publik

Keberadaan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Secara keseluruhan, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengubah dunia menjadi sebuah komunitas global, yang ditandai dengan munculnya manajemen kreatif digital dan arus informasi yang deras sebagai inti dari globalisasi (Nugroho, 2018). Pemerintah juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat penting dalam penerapan teknologi informasi untuk mewujudkan good governance. Media sosial menyediakan platform yang memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Melalui akun resmi di platform seperti Twitter, Facebook, Tiktok, Instagram, dan aplikasi lainnya pemerintah dapat dengan cepat menyampaikan informasi, kebijakan, dan program kepada masyarakat. Selain itu, media sosial juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, menciptakan dialog dua arah yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah.

Namun, meskipun penggunaan media sosial menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Risiko penyebaran informasi yang salah (hoaks) dan potensi konflik dari komentar publik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang jelas dan responsif terhadap isu-isu yang muncul di media sosial. Selain itu, pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam menggunakan media sosial secara efektif juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan bermanfaat. Dengan pendekatan yang terencana, media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dari perspektif teori administrasi publik, peran teknologi dalam mewujudkan good governance dapat dianalisis melalui dua dimensi utama: efisiensi dan partisipasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pemerintah untuk mengotomatisasi proses administrasi, yang mengurangi waktu dan biaya operasional. Dengan sistem manajemen yang berbasis digital, tugas-

tugas rutin seperti pengolahan data, pengarsipan, dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan publik, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena proses yang transparan dan terdokumentasi dengan baik. Dalam konteks ini, teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya penerapan praktik bisnis dalam sektor publik, di mana teknologi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

Di sisi lain, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik, yang merupakan salah satu pilar utama good governance. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, memberikan umpan balik, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teori partisipasi publik menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui aplikasi mobile dan media sosial, pemerintah dapat menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya good governance yang lebih baik.

Untuk mewujudkan good governance, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategis. Pengembangan infrastruktur digital yang merata sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan publik dengan mudah. Investasi dalam jaringan internet yang cepat dan perangkat teknologi yang memadai akan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, penerapan sistem informasi terintegrasi memungkinkan berbagai instansi pemerintah untuk berbagi data dan informasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, pemerintah harus memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dengan menyediakan aplikasi dan portal yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan menyampaikan keluhan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penggunaan teknologi juga krusial, agar pegawai dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan kinerja layanan, sehingga masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah. Pemerintah juga perlu mendorong inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan dan big data, akan membantu memperbaiki proses administrasi dan memberikan layanan yang lebih responsif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan good governance yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan memberikan masukan dan umpan balik melalui platform digital, berpartisipasi dalam jajak pendapat secara daring, serta menggunakan aplikasi mobile untuk melaporkan masalah atau keluhan terkait layanan publik. Masyarakat juga dapat terlibat dalam forum diskusi dan media sosial untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah, sehingga menciptakan komunikasi dua arah yang lebih efektif. Dengan adanya teknologi informasi, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang layanan dan kebijakan pemerintah, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Implikasi teknologi bagi pemerintah dan masyarakat di era sekarang sangat signifikan. Bagi pemerintah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya sistem digital, proses yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya, seperti pengarsipan dan pemrosesan data, dapat

diotomatisasi, sehingga mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu layanan. Selain itu, teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, karena informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat, teknologi memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan layanan publik. Dengan adanya portal web, aplikasi mobile, dan media sosial, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi mengenai layanan, peraturan, dan kebijakan pemerintah tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Selain itu, teknologi juga menciptakan ruang bagi partisipasi publik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui platform digital.

Namun, implikasi teknologi juga membawa tantangan, seperti masalah privasi dan keamanan data. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi masyarakat dilindungi dengan baik dan bahwa sistem yang digunakan aman dari ancaman siber. Selain itu, kesenjangan digital dapat menjadi isu, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaannya dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi ini. Dengan demikian, implikasi teknologi bagi pemerintah dan masyarakat di era sekarang adalah peluang untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi, sekaligus tantangan yang memerlukan perhatian dan solusi yang tepat.

Kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan good governance dari perspektif administrasi publik meliputi masalah infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil, yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat dalam menggunakan teknologi juga menjadi hambatan signifikan. Masalah keamanan data dan privasi juga sering kali menjadi perhatian, di mana potensi kebocoran informasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari dalam birokrasi itu sendiri dapat menghambat adopsi teknologi baru, sehingga mengurangi efektivitas implementasi sistem digital. Di sisi lain, peluang yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk good governance sangat besar. Dengan adanya teknologi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan dengan lebih cepat dan mudah. Teknologi juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, di mana mereka dapat memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Selain itu, penggunaan data analitik dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, pemerintah dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk mengatasi tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk good governance meliputi beberapa langkah strategis. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, agar akses layanan digital merata. Pelatihan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat juga harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan digital. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjaga keamanan informasi dan kepercayaan publik. Dalam upaya menerapkan birokrasi berbasis digital diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam pengembangan teknologi dapat menciptakan inovasi yang lebih baik. Serta, pemerintah menciptakan platform partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan akan membuat pemerintahan lebih responsif dan akuntabel.

Kesimpulan

Dalam era digital yang terus berkembang, peran teknologi dan inovasi dalam sektor publik menjadi semakin penting untuk mewujudkan good governance. Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi teknologi tetap ada. Kesenjangan akses terhadap teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi, dan ketidaksiapan birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan kepada pegawai dan masyarakat, serta mengembangkan kebijakan perlindungan data yang ketat. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kesimpulannya, untuk mencapai good governance yang efektif, pemerintah harus mendorong inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Dengan menciptakan platform partisipatif dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Daftar Rujukan

- Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, I. H. (2023). Teori Administrasi Publik Pengantar. In *Administrasi Negara Publik*.
- Bachtiar, R., Pramesti, D. L. D., Pratiwi, H. E., & Saniyyah, N. (2020). Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 104–129. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18585>
- Cecep Abdul Cholik. (2021). Teknologi Informasi, ICT,. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), 39–46.
- Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Idhartono, A. R. (2020). Studi Literatur : Analisis Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(3), 529–533. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.3.2020.541>
- Kusuma, F. K. (2022). Kesiapan Dan Tantangan Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Perkembangan Tekhnologi Guna Mempercepat Pembangunan Berkelanjutan Di Era Revolusi Digital Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 732–739.
- Nugroho, A. F. S. (2018). PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM SISTEM E-HEALTH “alodokter.com.” *Media Pustakawan*, 25(4), 93–103. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.9>
- Putu Tirka Widanti, N. (2024). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Retnowati, N. D., & Retnowati, D. (2008). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Seminar Nasional Informatika 2008 (SemnasIF 2008), 2008(semnasIF), 205–211.
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Sagena, U., Zahari, A. F. M., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). Reformasi Administrasi Publik. In *Pdanag: PT Global Eksekutif Teknologi*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.pdf>

- Septiandito Saputra, A. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi Pada Koperasi Di Era Industri 4.0. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 505–510. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.77>
- Sirait, E. R. E. (2016). Implementasi Teknologi Big Data Di Lembaga Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.17933/jppi.2016.060201>
- Srivastava, M. (2011). Good Governance - Concept, Meaning and Features: A Detailed Study. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1528449>
- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, XVII(01), 95–116. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 227–235. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15>
- Widyasari, Y., Daswati, & Ahsan, S. C. (2024). KABUPATEN DONGGALA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 669–682.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Reformasi Administrasi Publik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2). <http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.pdf>